

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Salsabila Izzatul Islam*, Dyah Ratnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

*Correspondence email: salsabilaizzatul108@gmail.com, dratnawati67@gmail.com

Abstrak. Penelitian bertujuan menguji serta melakukan analisis atas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pemerintah kota Balikpapan tahun 2016-2020. Populasi Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan. Jenis penelitian ini mempergunakan analisis deskriptif, pelaksanaan penelitian dengan pengujian hipotesis deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwasanya tidak ada pengaruh signifikan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah, secara signifikan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan, tidak adanya pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara signifikan terhadap Belanja Daerah, dan secara signifikan PAD yang Sah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.

Kata kunci: Regional Original Income (ROI); Regional Expenditures

Abstract. This study aims to examine and analyze the effect of local revenue (pad) on the local government expenditure of the Balikpapan City Government in 2016-2020. The population of the Balikpapan City Government APBD Realization Report 2016-2020 sourced from the Balikpapan City Financial and Asset Management Agency (BPKAD). This type of research uses descriptive analysis, this research was conducted by testing descriptive hypotheses. The results of this study indicate that Regional Taxes have no significant effect on Regional Expenditures, Regional Retributions have a significant effect on Regional Expenditures, the results of Separated Regional Wealth Management have no significant effect on Regional Expenditures, and Legitimate Regional Original Income has a significant effect on Regional Expenditures in the Balikpapan City Government.

Keywords: Regional Original Income (ROI); Regional Expenditures

PENDAHULUAN

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut sistem otonomi daerah. Pemberlakuan Undang-Undang No. 33 dan No. 34 tahun 2004 sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memberi wewenang guna mengelola keuangan yang bertanggungjawab kepada daerah, nyata serta lebih luas. PAD yakni suatu gambaran kemandirian dari suatu daerah. Selain itu juga diartikan sebagai penerimaan daerah yang murni dimana ini termasuk modal bagi daerah yang utama untuk mendanai pembangunan serta pemerintahan di wilayahnya. Otonomi daerah yang dijalankan di kota Balikpapan diharuskan bisa menambah PAD yang menjadi indikator paling penting bagi daerah dalam mewujudkan serta menyelenggarakan otonomi daerahnya. Artinya diharapkan PAD dipakai sumber penerimaan pemerintah daerah dalam APBD (Saraswati & Rioni, 2019).

Penggunaan Belanja Daerah yakni mendanai penyelenggaraan operasionalisasi pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten kota atau provinsi dimana ini meliputi urusan pilihan, urusan wajib, serta dengan penanganan dalam bidang yang bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah sesuai aturan perundang-undangan. Belanja daerah pada suatu daerah yang sangat tinggi perlu dibarengi dengan penerimaan keuangan daerah. Keberhasilan daerah terlihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya, sehingga dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah itu dapat mengetahui kemandirian suatu daerah. Gambaran dari rasio kemandirian daerah yakni mengenai tingkat kemandirian daerah atas bantuan dari pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat (pihak eksternal). Rasio tersebut diperlihatkan oleh rasio PAD atas total pendapatan daerah. Angka rasio PAD yang makin besar menandakan kemandirian daerah itu makin tinggi. Akan tetapi apabila sebaliknya maka kemandirian daerah tersebut makin rendah. Apabila terjadi kenaikan pada PAD di suatu daerah menandakan kemampuan daerah akan naik juga dalam hal pengeluaran belanja daerah (Kamaroellah, 2017).

Usaha daerah guna meminimalkan sikap bergantung pada pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yakni Pendapatan Asli Daerah. Bagi pemerintah daerah pendapatan tersebut menjadi bagian keuangan paling besar, yang mana hal itu perlu ditingkatkan secara terus-menerus supaya pelaksanaan pemerintah daerah dapat berjalan lancar sehingga secara bertahap daerah bisa mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Balikpapan yakni salah satu kota di Kalimantan Timur, Indonesia. Setiap daerah mempunyai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam periode satu tahun yang berisi APBD yang sudah dianggarkan dan APBD yang telah direalisasikan dalam satu tahun periode tersebut termasuk Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat berapa besar APBD beserta rinciannya yang telah direalisasikan oleh daerah dalam periode tersebut. Belanja daerah dan PAD yakni komponen yang ada dalam rincian APBD (Asih & Irawan, 2018).

Kondisi darurat yang dialami seluruh dunia saat ini mempengaruhi aktivitas perekonomian sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 situasi akan semakin buruk apabila Pemerintah Daerah tidak bisa menggali potensi untuk peningkatan PAD. Sejumlah dampak yang terjadi khususnya dalam hal ekonomi nasional yakni terjadi keterlambatan dan tidak sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut dipenuhi oleh banyak faktor selain karena daya beli dan daya saing masyarakat yang menurun terkhusus saat pandemi ini juga dikarenakan keterbatasan yang tidak bisa dikerjakan sehingga berdampak baik terhadap penurunan penerimaan negara dan daerah (Paramitha, 2021). Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilaksanakan secara hati-hati dimasa Covid-19 ini, di mana APBD yakni suatu instrumen kebijakan bagi pemerintah daerah terutama kemampuan pendapatan asli daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan (Onibala dkk., 2021). Perekonomian global pada tahun 2020 sangat terpengaruhi dengan adanya Covid-19 tidak terkecuali bagi Pemerintah Kota Balikpapan. PAD tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 senilai Rp26,57 Miliar, sehingga PAD yang direncanakan tahun anggaran 2020 sebelum perubahan menjadi senilai Rp715 Miliar dari PAD tahun anggaran 2019 setelah perubahan yaitu senilai Rp688,4 Miliar atau sebesar 3,86% (www.kalimantan.bisnis.com diakses pada 15 Januari 2022).

Masalah yang dapat dilihat yaitu ketidaksesuaian antara teori dengan data yang disajikan diatas. Dimana teori mengatakan apabila PAD meningkat maka Belanja daerah juga meningkat yang menyatakan bahwa kemandirian suatu daerah sudah terlaksana dengan baik. Yang mana dapat dikatakan bahwa daerah tidak mempunyai ketergantungan terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat (Fadli, 2017). Kemandirian daerah di bidang keuangan terlihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tersebut. (Susilowati et al., 2021)

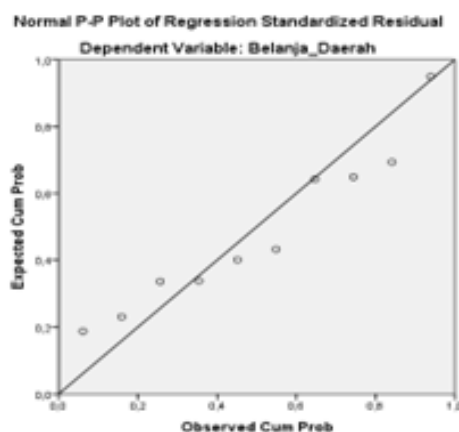
Bahwasanya pengelolaan komponen PAD di Kota Balikpapan belum terlaksana secara baik potensi yang sebenarnya. Sesuai variabel di atas didapat gambaran bahwasanya retribusi daerah dan potensi pajak daerah bagi Pemerintah Kota Balikpapan belum diketahui, khususnya jenis retribusi daerah apa saja yang menjadi pendapatan yang potensial bagi PAD. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial jika ditingkatkan serta diketahui pengelolaan sesuai potensinya akan memberi tambahan PAD, namun sebaliknya maka akan menimbulkan kerugian sebab pemanfaatan potensinya tidak bisa terlaksana secara maksimal (Abdul Halim, 2016). Menurut Nina Nasution (2018) menjabarkan bahwasanya kemampuan pemerintah serta sisi pendapatan daerah bisa menaikkan pendapatan daerahnya masih lemah secara berkesinambungan. Permasalahan yang kerap kali timbul yakni kemampuan pemerintah daerah yang rendah dalam hal menghasilkan prediksi pendapatan daerah berdasarkan kenyataan, memiliki sumber yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga belum bisa dipungut secara optimal dan pemerintah daerah mempunyai kecenderungan untuk bergantung pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dana perimbangan dibandingkan mengoptimalkan PAD dalam membiayai otonomi daerah sesuai potensi daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh sumber-sumber PAD Kota Balikpapan menggunakan data-data tahun anggaran yang sudah teraudit dan diharapkan penelitian ini bisa memberi masukan bagi pemerintah Kota Balikpapan.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Balikpapan periode 2016-2020. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yakni lain-lain PAD yang sah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, pajak daerah. kemudian pada variabel terikat yakni belanja daerah. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yakni Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016-2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan. Total sampel yang didapat adalah 10 data yang diperoleh komponen PAD dalam Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Balikpapan persemester dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020).

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder ialah data yang memperjelas dan relevan dengan penelitian ini data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Balikpapan. Data yang digunakan berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Data yang dikumpulkan adalah Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi APBD pada periode 2016-2020, Lain-lain PAD yang Sah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, retribusi daerah, dan pajak daerah. metode pengumpulan data adalah dokumentasi, dengan Data yang dikumpulkan adalah Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi APBD pada periode 2016-2020, Lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah, dan pajak daerah yang bersumber dari BPKAD Kota Balikpapan.

HASIL



Sumber: data olahan

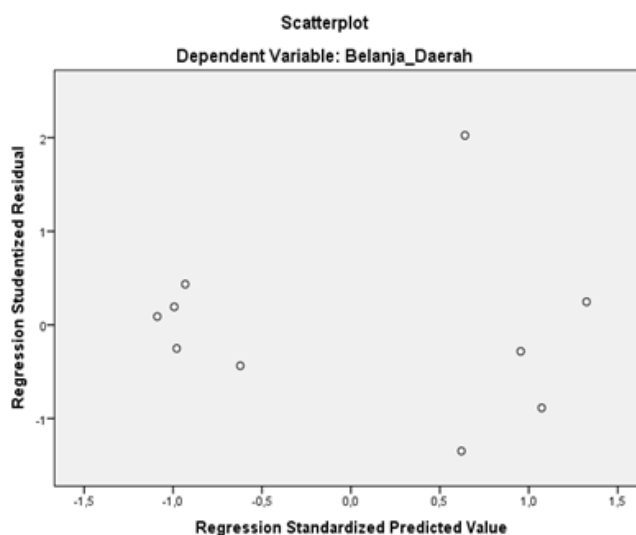
Gambar 1
Normal Probability Plot

Gambar 1 terlihat bahwasanya grafik normal *probability plot* memperlihatkan pola grafik normal. Hal itu terlihat dari penyebaran titik mengikuti garis diagonal dan di sekitar garis diagonal. Maka dari itu kesimpulannya model regresi layak dipakai sebab memenuhi asumsi normalitas. Tabel 1 terlihat bahwasanya tidak terjadi gangguan multikolinieritas pada model regresi. Hal tersebut terlihat dari nilai *tolerance* setiap variabel melebihi 10 % (0,1). Selain itu hasil hitung VIF juga memperlihatkan bahwasanya nilai VIF setiap variabel kurang dari 10. Sehingga kesimpulannya antar variabel bebas pada model regresi tersebut tidak ada multikolinieritas.

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah	,286	4,944
Restribusi Daerah	,133	4,938
Hasil Pengelolaan	,279	3,787
Lain-lain PAD	,156	6,431

Sumber: data olahan



Sumber: data olahan

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot

Gambar 2 terlihat tidak adanya pola penyebaran yang jelas pada titik-titik pada grafik *scatterplot* serta penyebaran titik terjadi di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pada model regresi tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas. Tabel 2 didapat durbin-watson stat (dw) senilai 2,130 berada antara $dU (1,863) < d (2,034) < 4-dU (2,137)$. Maka kesimpulannya model tidak ada autokorelasi.

Tabel 2
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,992 ^a	,985	,973	117053590771,34836	2,034

Sumber: data olahan

Tabel 3
Model Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,134	1,428			3,595	,016
Pajak Daerah	-2,767	1,528	-0,59		-1,81	,130
Restribusi Daerah	85,658	22,469	1,819		3,812	,012
Hasil Pengelolaan	-96,608	52,091	-0,612		-1,86	,123
Lain-lain PAD	10,523	3,346	0,44		3,145	,026

Sumber: data olahan

Tabel 3 persamaan regresi linier berganda yang didapat yakni:

1. Sesuai hasil persamaan regresi diatas, didapat konstanta senilai 5,143. Hal itu menandakan jika kondisi variabel bebas penelitian ini dianggap konstan, maka variabel terikat penelitian ini yakni 5,143.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel (X2) bernilai 85,658, dan variabel (X4) bernilai 10,523 yang mana nilai itu bernilai positif maka secara positif variabel tersebut berhubungan pada variabel Belanja daerah (Y). berarti apabila Retribusi daerah (X2), dan Lain-lain PAD yang sah (X4) mengalami kenaikan satu-satuan variabel maka mengakibatkan variabel Belanja daerah (Y) juga meningkat sebesar nilai koefisien regresinya.
3. Koefisien regresi pada variabel (X1) bernilai -2,767, dan variabel (X3) bernilai -96,608 yang mana nilai itu bernilai negatif maka secara negatif variabel tersebut memiliki hubungan terhadap variabel Belanja daerah (Y). Berarti apabila Pajak daerah (X1), dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) mengalami kenaikan satu-satuan variabel maka mengakibatkan variabel Belanja daerah (Y) juga meningkat sebesar nilai koefisien regresinya.

Tabel 3 juga menjelaskan bahwa:

1. Variabel Pajak daerah (X1). Tingkat signifikansi pada variabel Pajak daerah (X1) yakni 95% ($\alpha = 0,05$). Sementara angka signifikansi (P Value) senilai 0,130 > 0,05. Sesuai hal itu, maka ditolaknya H_a dan diterimanya H_0 berarti secara signifikan variabel Pajak daerah (X1) tidak berpengaruh pada variabel Belanja daerah (Y).
2. Variabel Restribusi daerah (X2). Tingkat signifikansi pada variabel Restribusi daerah (X2) yakni 95% ($\alpha = 0,05$). Sementara untuk angka signifikansi (P Value) senilai 0,012 < 0,05. Sesuai hal itu, maka H_a diterima dan H_0 ditolak atau artinya secara signifikan variabel Restribusi daerah (X2) berpengaruh pada variabel belanja daerah (Y).
3. Variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3). Tingkat signifikansi pada variabel (X3) yakni 95% ($\alpha = 0,05$). Sementara angka signifikansi (P Value) yakni 0,123 > 0,05. Sesuai hal itu, maka ditolaknya H_a dan diterimanya H_0 secara signifikan artinya variabel Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) tidak berpengaruh pada variabel Belanja daerah (Y).
4. Variabel Lain-lain PAD yang sah (X4). Tingkat signifikansi pada variabel (X4) yakni 95% ($\alpha = 0,05$). Sementara angka signifikansi (P Value) 0,026 < 0,05. Sesuai hal itu, maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya secara signifikan variabel Lain-lain PAD yang sah (X4) berpengaruh pada variabel belanja daerah (Y).

Tabel 4
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.440	4	1.110	81,015	,000 ^b
Residual	.685	5	0.137		
Total	4.508	9			

Sumber: data olahan

Tabel 4 hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) pada penelitian ini diperoleh Angka signifikansi senilai $0,000 < 0,05$, dan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$), F hitung senilai 81,015. Sesuai hal itu, maka ditolaknya H_0 berarti variabel bebas penelitian ini berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat penelitian ini. Sesuai Tabel 2 Adjusted R Square terlihat senilai 0,973 atau 97,3%. Hal tersebut menandakan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 97,3%, sementara untuk sisanya dijelaskan faktor lain diluar penelitian.

Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah

Sesuai hasil uji secara parsial diperoleh secara signifikan pajak daerah berpengaruh pada belanja daerah dengan signifikansi bernilai $0,130 > 0,05$, sehingga pajak daerah secara individual tidak mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Walaupun pengaruhnya tidak signifikan akan tetapi memiliki potensi yang besar dilihat dari banyaknya jumlah pajak daerah yang masih belum dipungut secara optimal oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Namun penerimaan pajak daerah dinilai tidak signifikan dikarenakan faktor pembentuk belanja daerah Kota Balikpapan tidak hanya dari PAD saja sebagai salah satu pembentuk belanja daerah melainkan juga dari pembiayaan daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini juga disebabkan karena terjadinya penurunan drastis di tahun 2020 akibat Covid-19 yang mana seluruh kegiatan belanja daerah ini lebih dipusatkan untuk pendanaan kebutuhan pencegahan Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak daerah tersebut kurang maksimal dan sesuai dengan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Balikpapan bahwa peningkatan pajak daerah berbanding lurus dengan peningkatan belanja daerah, namun dalam tahun 2018 belanja daerah mengalami kenaikan yang tinggi, sehingga kenaikan pajak daerah yang ada masih tidak berpengaruh signifikan terhadap kenaikan belanja daerah tersebut sehingga dapat mengakibatkan hasil pajak daerah tersebut tidak berpengaruh signifikan.

Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa retribusi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi $0,012 < 0,05$, maka retribusi daerah secara individual berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi atau pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah daerah dengan memberikan fasilitas kepada yang melakukan pembayaran. Tidak semua daerah terdapat retribusi, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk mengharapkan retribusi daerah dapat berperan besar dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah.

Pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja daerah

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi $0,123 > 0,05$, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara individual tidak mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap belanja daerah

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$, maka lain-lain PAD yang Sah secara individual berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah (Yusuf Hafandi dan Romadhon, 2020). Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah yakni dengan cara yang wajar serta sesuai peraturan yang ada.

SIMPULAN

1. Secara signifikan Pajak Daerah tidak berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Secara signifikan Retribusi Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Secara signifikan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Secara signifikan Lain – Lain PAD yang Sah berpengaruh pada Belanja Daerah di Pemerintah Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Aryanti, A. A., Militina, T., & Paminto, A. 2019. Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta dana alokasi khusus terhadap belanja daerah serta produk domestik regional bruto di kota samarinda. *Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda*.
- Asih, S., & Irawan. 2018. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Barmin, R. 2018. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. *Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gorontalo*, 26.
- Chatra, A. dan Y. 2017. Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Benefita*, 2(2), 122–131. <https://doi.org/10.22216/jbe.v2i2.953>
- Dermawan, W. D. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 153–156. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.963>
- Fadli, F. 2017. Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312>
- Fatmawati, A. P., & Ria Sari, N. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Pulau Jawa. *Land Journal*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i1.1034>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. 2018. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v0i0.3546>
- Firdausy, C. M. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. 85–88, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 9th ed..* Universitas Diponegoro.
- Hafandi, Y., & Romadhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. 3(2), 182–191.
- Halim, A. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, fan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 9(3), 195–213.
- Kamaroellah, R. A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1126>
- Nasution, N. A. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(1), 1–19.
- Novalistia, R. L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–25.
- Novandy, A., Palampanga, A. M., & Ridwan. 2015. Pengaruh Belanja Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Katalogis*, 3, 47–158.
- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 67–89(22(2)).
- Paramitha, A. A. 2021. Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai dampak wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Urnal Supremasi*, 94–104(11(1)).
- Permatasari, I. P. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi D.I Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
- Pratomo, Y. A. L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD terhadap Belanja Daerah. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Rosianan, D. E., & Nur, H. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. 2019. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2).
- Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono, P. D. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Juwari. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(01), 115–126.
- Syafrudin, A. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Kudus Tahun 2004 – 2013. Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang.
- Zahari, M. 2020. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 149. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.131>